

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia di awal abad ke-21 dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat besar. Tantangan utama yang paling nyata adalah bukan saja globalisasi yang ditandai oleh tingkat persaingan yang semakin tinggi, juga pengaruh krisis moneter berkepanjangan yang melanda Indonesia. Dampak krisis moneter tersebut bukan saja telah memperlebar peta kemiskinan masyarakat, juga berpengaruh pula pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah kemiskinan merupakan hal yang mendasar bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun. Kemiskinan adalah cerminan dari adanya kesenjangan dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat. Kesenjangan ini harus diatasi karena pembangunan yang kita selenggarakan adalah pembangunan yang berkeadilan.

Masyarakat miskin ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan, dan rapuhnya kondisi kesehatan dan gizi. Orang miskin terbelit di dalam lingkaran ketidakberdayaan. Rendahnya pendapatan mengakibatkan pula rendahnya konsumsi pangan dan gizi sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kesehatan. Kesehatan yang buruk menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas kerja mengakibatkan rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan

menyebabkan pula rendahnya daya jangkau terhadap pelayanan pendidikan, sehingga penduduk miskin sulit untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Rendahnya pendidikan pada gilirannya mengakibatkan terbatasnya lapangan kerja yang dapat dimasuki untuk memperoleh nafkah yang wajar. Demikianlah seterusnya, sehingga penduduk miskin yang hidup dalam serba kekurangan sulit untuk dapat keluar dari lingkaran ketidakberdayaan. Karena itulah maka anggota masyarakat yang lebih beruntung perlu mengulurkan tangan untuk mengangkat mereka dari kesengsaraan.

Oleh karena itu, salah satu langkah mendasar dalam upaya mengangkat masyarakat miskin dari kesengsaraan adalah mengentaskan kelompok masyarakat terbawah, yaitu penduduk yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Secara akademik, upaya tersebut berkenaan dengan membangun kesejahteraan manusia melalui upaya rekonstruksi struktur dan proses pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan masyarakat secara kuantitatif maupun kualitatif. Pembangunan seperti itu, dapat melalui pendidikan yang relevan. Pendidikan yang relevan artinya bila upaya-upaya pendidikan dapat membantu individu atau masyarakat dalam memecahkan problema-problema masyarakat yang lebih besar dan menyeluruh. Karena itu pembangunan pendidikan seyogyanya dalam rangka penyesuaian diri terhadap perubahan sosial masyarakat pada umumnya.

Tugas berat yang dibebankan kepada pendidikan yaitu harus turut serta menanggulangi akibat krisis tanpa meninggalkan perannya dalam menciptakan ilmu dan teknologi. Akibatnya, semakin banyak tugas dan peran yang dibebankan kepada pendidikan, menjadi pendidikan itu sendiri tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Di satu sisi upaya pendidikan harus membuat warga negara yang produktif, membuat warga negara yang baik, taat dan rasional, warga dunia yang dihormati, merupakan jenis tujuan yang wajib dilaksanakan oleh pendidikan. Sehingga pendidikan harus dikelola dan disediakan untuk orang banyak yang memenuhi hasrat orang banyak dan responsif terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tugas berat dunia pendidikan yang dihadapi dewasa ini sebenarnya telah disinyalir Coomb (The World Educational Crisis, 1968) yang mengemukakan bahwa krisis yang melanda dunia pendidikan salah satunya disebabkan oleh "the acute scarcity of the resources", yang ditandai kurang responsifnya sistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Namun apakah pengaruh krisis moneter pada perkembangan dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini masih relevan dengan apa yang disinyalir Coomb?

Apabila kita sepakat dengan apa yang dikemukakan Coomb di atas, tampaknya perlu mereformasi basis pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan sumber daya manusia. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia tidak terlepas dari kebijakan di bidang

pendidikan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pendidikanlah yang dapat mengembangkan potensi, keahlian dan profesionalisme. Dalam kaitan ini, tampaknya sinyalemen yang dikemukakan Philip Coomb masih relevan.

Bertolak dari aspirasi rakyat yang tertuang dalam GBHN yang telah menempatkan manusia Indonesia sebagai titik pusat segenap gerak pembangunan dalam PJP II, maka pembangunan harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan. Dengan demikian, berbicara mengenai sumber daya manusia, kita berbicara mengenai hal yang sangat mendasar dalam konsepsi pembangunan nasional bangsa Indonesia. Kita berbicara mengenai hakikat pembangunan sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Aspirasi tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia yang ingin kita bangun adalah manusia dengan kualitas yang utuh manusia yang sehat jasmani dan rohani, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, cinta tanah air, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, produktif, bertanggung jawab serta mempunyai kesetiakawanan dan disiplin nasional yang tinggi.

Jika ditinjau dari segi tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, maka upaya

pendidikan bukan hanya menjadi urusan pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan antara pemerintah, keluarga dan masyarakat. Oleh karena pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah maka perlu adanya pengaturan dan pembinaan yang saling menunjang dan saling mengisi, sehingga proses pendidikan berkembang dalam suatu arah terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya.

Ada tiga kelompok masyarakat yang diharapkan untuk meningkatkan peranannya, yaitu (1) orang tua peserta didik, (2) masyarakat umum, dan (3) masyarakat pendidikan atau sekolah. Ketiga kelompok masyarakat inilah yang senantiasa ditingkatkan peranannya. Sasaran pendidikan dalam masyarakat umum diarahkan pada kelompok masyarakat: (a) warga masyarakat/orang yang berusia 10 tahun sampai 45 tahun yang berkesempatan menikmati pendidikan dalam persekolahan; (b) Anak-anak putus sekolah (drop out); (c) Anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena kesulitan ekonomi orang tua; (d) warga masyarakat yang pernah menduduki bangku sekolah dan ingin menambah/meningkatkan atau memperdalam suatu pengetahuan keterampilan. Usaha memobilisasi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pendidikan sangat besar artinya, masyarakat dapat mengembangkan model-model kegiatan pendidikan terpadu yang sesuai dengan tingkat kebutuhan anggota masyarakatnya.

Melalui pembangunan pendidikan yang terpadu dengan bidang-bidang lainnya, diharapkan dapat terwujud manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas utuh, jasmaniah-rohaniah, materil-spiritual. Pendidikan yang pada dasarnya merupakan upaya untuk membentuk watak dan kepribadian serta memperkaya pengetahuan dan kemampuan profesional perlu diupayakan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan, baik di sekolah maupun luar sekolah termasuk dalam keluarga dan masyarakat.

Untuk membantu individu atau masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di dalam lingkungannya, maka perlu berbagai upaya dilakukan, baik oleh pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu wujud upaya tersebut antara lain yaitu timbulnya inovasi dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan berbagai programnya diantaranya pengembangan ekonomi produktif melalui Kelompok Belajar Usaha (KBU) dengan harapan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat lingkungannya. Dalam mengembangkan eksistensinya lembaga tersebut perlu didukung oleh berbagai konsep antara lain oleh kekuatan manajemen yang handal, sehingga bisa dibanggakan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Manajemen pengembangan Kelompok Belajar Usaha (KBU), secara konseptual dikembangkan dengan bersandar pada pemikiran yang mendasar dari Hersey dan Blanchard, (1982) dalam Engking Soewarman

Hasan (2002:76), menegaskan sebagai berikut : "Management as working with and trough individuals and groups to accomplish organizational goals". Konsep tersebut mengandung makna bahwa (1) manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang, (2) keterampilan tersebut merupakan kemampuan dalam menjalin kerjasama untuk melakukan suatu kegiatan bersama dengan orang lain atau melalui orang lain, (3) kemampuan dan keterampilan bekerjasama atau melalui orang lain tersebut adalah dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau lembaga.

Pemikiran tersebut memberikan keyakinan bahwa dalam pengembangan Kelompok Belajar Usaha (KBU), implementasinya memerlukan adanya kebersamaan dengan mengoptimalkan kekuatan individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan lembaga PKBM Al-Ghazali Jamanis Tasikmalaya.

Sejalan dengan itu, dalam PJP II pendidikan nasional perlu diselenggarakan secara lebih bermutu dan merata, serta diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas SDM Indonesia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil. Amanat GBHN tersebut dengan jelas menegaskan pentingnya kepedulian kita untuk merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan, terutama bagi masyarakat yang masih terkungkung dengan belenggu kemiskinan dan



berbagai keterbelakangan. Lebih jelas dari amanat GBHN dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan adanya dua jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Dengan diundangkannya sistem pendidikan tersebut, maka telah ditetapkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah salah satu jalur pendidikan yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya bagi masyarakat. Sebagaimana Soedirjarto dalam Umberto Sihombing (1999:iii) menyebutkan bahwa

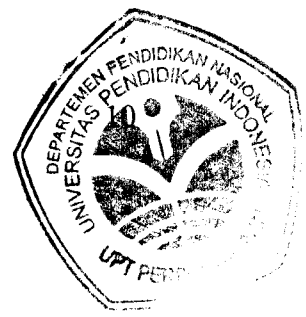
Pendidikan Luar Sekolah bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang karena berbagai faktor seperti kesulitan ekonomi, sosial dan lingkungan yang kurang mendukung tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah.

Dengan demikian jelas bahwa pendidikan luar sekolah di samping memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan, juga memberikan pelayanan kepada mereka yang ingin mendapat suatu keterampilan untuk mencari kerja atau perubahan tuntutan pekerjaan yang sedang digeluti sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Berdasarkan pada pendapat di atas, bahwa perspektif potensi sumber daya manusia yang ada di masyarakat, dikaitkan dengan kebutuhan pasar dan kecenderungan yang menentukan perubahan, dimana yang menjadi determinan perubahan pendidikan luar sekolah adalah pembelajarannya diarahkan pada pemberdayaan sumber daya

manusia agar memiliki kreativitas, dinamis, mandiri, punya etos kerja serta mampu melihat dan memanfaatkan peluang dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga belajar, sehingga dapat menghasilkan warga belajar yang berpendirian teguh untuk menghadapi masa depan. Hal tersebut jika dicermati secara empiris, program pendidikan luar sekolah terus berupaya dan beradaptasi dengan berbagai tuntutan serta perkembangan masyarakat, sebagaimana telah dikembangkan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, yaitu pemberdayaan. Dalam penerapan strategi ini, dimana program-program pendidikan luar sekolah menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan sosial, budaya masyarakat, maka pendidikan ini dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat.

Salah satu bentuk konkrit dari lembaga pendidikan yang dimiliki masyarakat saat ini yang diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dimana keberadaan PKBM sebagai lembaga pendidikan masyarakat yang pendekatannya pula berbasis masyarakat yang kental dengan nuansa partisipasi masyarakat walaupun keberadaannya relatif baru, namun kecenderungannya telah menghembuskan angin baru dalam merealisasikan demokrasi pendidikan. Dari pemikiran ini, penulis ingin mencoba melakukan analisis deskriptif terhadap pelaksanaan manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi peningkatan pendapat warga belajar pada Kelompok Belajar Usaha (KBU) binaan di PKBM Al-Ghazali Tasikmalaya.



B. Identifikasi Masalah

Sebuah komisi yang besar terdiri para pakar pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah telah membentuk suatu jaringan dalam upaya merumuskan suatu konsepsi mengenai Community Based Education serta berbagai implikasinya bagi pengembangan pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah, termasuk didalamnya mengenai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan suatu upaya dalam memecahkan berbagai permasalahan pendidikan, drop out, meningkatkan perubahan masyarakat, meningkatkan partisipasi sekolah serta partisipasi dan peningkatan pada jalur pendidikan luar sekolah. Adapun pelayanan program yang diprioritaskan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat sasaran, baik mereka yang bertempat di perkotaan maupun yang tinggal dipedesaan.

Sedangkan penyelenggaraan program Pendidikan Luar Sekolah melalui wadah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Jawa Barat, sebagaimana data yang tercatat pada Bidang Dikmas Departemen Pendidikan Nasional per bulan Juli 2000 seluruhnya berjumlah 172 PKBM. Dari jumlah tersebut, jenis dan jumlah program yang diselenggarakan serta model proses pembelajaran yang diberikan kepada masyarakat (warga belajar) terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut, selain menjadi ciri khas bagi PKBM yang bersangkutan, juga memiliki makna dan tingkat efektivitas program yang diselenggarakannya.

Dengan melihat hasil penilaian tim penilai program Pendidikan Masyarakat Jawa Barat, peninjauan dan telaah para pembina teknis tingkat pusat dan provinsi, bahwa PKBM Al-Ghazali Tasikmalaya Jawa Barat memiliki keunggulan tertentu dan juga kelamahan-kelamahan dalam penyelenggaraan program pendidikan luar sekolahnya.

Dari permasalahan di atas dapatlah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Menyenggarakan berbagai program Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat, terutama pembelajaran keterampilan yang berkaitan dengan home industri (industri rumah tangga);
2. Sarana dan pra sarana pembelajaran memadai;
3. Metode dan teknik pembelajaran sepenuhnya dipahami oleh para instruktur atau tutor;
4. Waktu dan tempat pembelajaran serta sarana yang memungkinkan,
5. Dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran keterampilan industri kecil rumah tangga (home industri) menggunakan sistem insentif;
6. Hasil produksi memiliki pasar yang baik;
7. Penerapan konsep pendidikan luar sekolah secara keseluruhan belum begitu efektif;
8. Kontinuitas program bagi yang telah menyelesaikan program belum semuanya bisa diatasi secara utuh oleh lembaga;

9. Hasil pembelajaran relatif bervariasi; serta
10. Dampak pembelajaran nampak sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Latar belakang masalah menunjukkan gambaran bahwa usaha memobilisasi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pendidikan sangat diperlukan. Karena itu, pengembangan model-model pendidikan masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berkualitas menjadi menarik untuk diteliti. Masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan pada "Manajemen pembelajaran Kelompok Belajar Usaha (KBU) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam upaya meningkatkan pendapatan warga belajar untuk menambah penghasilan keluarga kelompok masyarakat". Dari Pokok masalah tersebut dapat dirinci kepada:

1. Profil manajemen kegiatan PKBM Al-Ghazali Taikmalaya
2. Manajemen pembelajaran Kelompok Belajar Usaha yang menyangkut (1) identifikasi kebutuhan belajar; (2) rumusan tujuan pembelajaran; (3) penetapan materi, metode dan teknik pembelajaran; (4) proses pembelajaran; (5) evaluasi pembelajaran
3. Dampak pembelajaran KBU terhadap peningkatan pendapatan warga belajar, yang meliputi : (1) dampak bagi warga belajar secara langsung; (2) dampak bagi lingkungan sosial; serta (3) dampak bagi pendidikan lanjutan.

D. Definisi Operasional

1. Manajemen

Terry dalam Panglaykim (1984:27) mengemukakan : “The accomplishing of a predetermined objective through the efforts of other people” (Mencapai tujuan yang ditetapkan terdahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain). Kemudian pengertian lain diungkapkan Hersey dan Blanchard dalam Djudju Sudjana (2000:17) : “Management as working with and through individual and groups to accomplish organizational goal” (Pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud mencapai tujuan-tujuan organisasi).

Dalam manajemen terdapat tiga dimensi yang penting sebagaimana yang dikemukakan oleh Djudju Sudjana (2000:18) yang pada intinya mengemukakan, dimensi pertama, bahwa dalam manajemen terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola (pemimpin, kepala, komandan, ketua dsb). ..., dimensi kedua menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, dan dimensi ketiga ialah bahwa pengelolaan itu dilakukan dalam organisasi.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan memperoleh hasil melalui kegiatan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan karena menyangkut kemampuan dan keterampilan

inilah maka unsur manusia dalam manajemen merupakan unsur penting dan dominan baik sebagai penggerak (pimpinan, manajer, ketua, administrator) maupun yang digerakan (staf, bawahan, karyawan).

2. Pendidikan Luar Sekolah

Dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 10 ayat 3 menegaskan bahwa "Pendidikan Luar Sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan". Pengertian lain disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Bab I Pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan "Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak". Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud pendidikan luar sekolah dalam penelitian ini adalah pembelajaran keterampilan industri kecil rumah tangga (home industri) yang diselenggarakan oleh PKBM Al-Ghazali Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan suatu tempat untuk mengintensifkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat, pelaksanaannya dipusatkan di suatu tempat dengan status pengelolaan dan pemilikannya ada oleh dan untuk masyarakat. Disamping itu pula bahwa yang dimaksud Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

sebagai “Tempat percontohan belajar, bekerja dan berusaha bagi masyarakat sebagai warga belajar dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Sedangkan menurut Balitbang Depdiknas (2000:19) PKBM adalah “Suatu tempat kegiatan pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya”.

Adapun yang dimaksud PKBM dalam penelitian ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Ghazali Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

4. Peningkatan

Peningkatan asal kata **tingkat** (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 : 1060) dengan mendapat imbuhan awalan **pe** dan akhiran **an**, yang artinya suatu proses upaya dalam melaksanakan kegiatan (usaha) terencana dengan langkah-langkah yang ditentukan untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Yang dimaksud peningkatan dalam penelitian ini adalah suatu upaya untuk mempertinggi (meningkatkan) kualitas kehidupan warga belajar dari hasil pendapatannya setelah mengikuti pembinaan pada Kelompok Belajar Usaha (KBU) Binaan di PKBM Al-Ghazali Tasikmalaya.

5. Pendapatan

Pendapatan identik dengan kata penghasilan, pencarian dan kata penemuan, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (1995 : 208) "Suatu hasil kerja (usaha) atau sesuatu yang tidak ada sebelumnya". Pengertian pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh warga belajar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan keterampilan yang didapat dari binaan pada Kelompok Belajar Usaha (KBU) di PKBM Tasikmalaya.

6. Warga Belajar

Warga belajar adalah setiap anggota masyarakat yang belajar di jalur pendidikan luar sekolah (Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991, Pasal 1 ayat 2). Yang dimaksud warga belajar dalam tesis ini adalah anggota masyarakat yang mengikuti pembinaan, pelatihan serta pembelajaran yang diwadahi oleh Kelompok Belajar Usaha (KBU) di PKBM Al-Ghazali Rajaplah Tasikmalaya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengungkap pelaksanaan manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengungkapkan data tentang profil manajemen kegiatan PKBM yang dilakukan Al-Ghazali Tasikmalaya.

2. Untuk mengungkap data tentang manajemen pembelajaran di Kelompok Belajar Usaha (KBU) PKBM Al-Ghazali Tasikmalaya.
3. Untuk mengungkap data tentang dampak pembelajaran Kelompok Belajar Usaha (KBU) terhadap peningkatan pendapatan warga belajar di PKBM Al-Ghazali Tasikmalaya.

F. Manfaat Penelitian

Masalah-masalah yang berkenaan dengan manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam upaya peningkatan pendapatan warga belajar sebetulnya menuntut pemecahan yang harus didukung dengan hasil penelitian, karena itu hasil penelitian ini akan dapat merangsang peneliti lain untuk turut mengembangkan pemikiran lebih lanjut. Selain itu, secara akademik pemecahan masalah ini berkaitan dengan disiplin ilmu pendidikan, karenanya melalui penelitian ini turut pula memperkaya hazanah Ilmu Pendidikan Luar Sekolah, khususnya dalam bidang kajian proses pelaksanaan pembelajaran masyarakat.

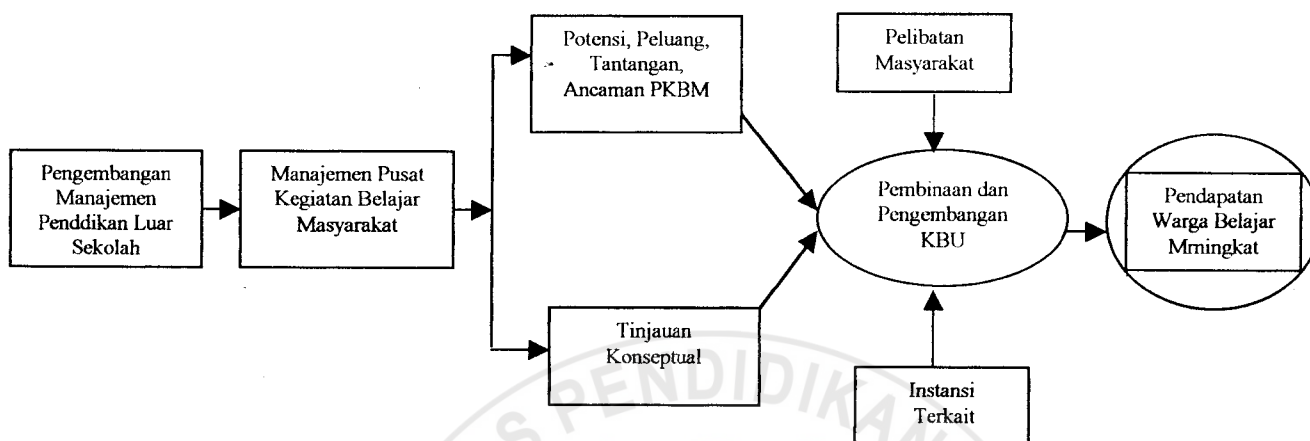
Di samping itu, hasil penelitian ini dapat pula digunakan secara praktis dalam organisasi pendidikan, khususnya dalam pembenahan, dan peningkatan mutu layanan manajemen pendidikan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh setiap pengelola organisasi pendidikan, baik pada tingkat lokal, regional maupun tingkat pusat sebagai model alternatif untuk kelompok masyarakat lainnya yang

berkarakteristik sama dengan objek yang dijadikan kasus dalam penelitian ini.

G. Paradigma Penelitian

Secara teoritis, sekalipun belum disertai peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai kontribusi pendidikan luar sekolah sebagai sub sistem dari pendidikan nasional memiliki fungsi ganda, yaitu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia serta bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya (UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dan 4). Di samping itu pendidikan luar sekolah bertujuan melayani warga belajar agar tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan kehidupannya, membina warga belajar guna memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi serta memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah (PP No. 71 Tahun 1991). Dalam upaya melayani, membina dan memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, pendidikan luar sekolah mengembangkan berbagai program, yaitu pengembangan anak dini usia (PADU), pemberantasan buta huruf, kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP, Kursus-kursus, Magang, KBU, Pendidikan Kewanitaan serta berbagai keterampilan lainnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dikembangkan paradigma penelitian seperti pada Gambar 1.



Gambar 1 : Paradigma Penelitian

H. Kerangka Pemikiran

Merujuk konsepsi teoritis dan kerangka pemikiran di muka, maka asumsi yang dijadikan titik-tolak penelitian adalah:

1. Pada dasarnya pembangunan sumber daya manusia Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya; Sumber Daya Manusia merupakan "Satu-satunya unsur organisasi yang dapat berperan sebagai motor penggerak sarana, prasarana dan sumber daya lainnya" (Siagian, 1984:23); "Tidak ada tugas yang lebih penting yang dihadapi oleh setiap organisasi kecuali pengembangan sumber daya... yang dimilikinya serta menciptakan kondisi yang memungkinkan sumber daya tersebut dapat menyumbangkan semua kemampuan mereka

bagi kejayaan organisasi" (Paul Darling dan Peter Lookwad, 1992:20).

2. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya tingkat pendapatan, serta rapuhnya kondisi kesehatan dan gizi. Rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya konsumsi pangan dan gizi sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kesehatan. Kesehatan yang buruk menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas kerja mengakibatkan rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan menyebabkan pula rendahnya daya jangkau terhadap pendidikan, sehingga penduduk miskin sulit untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Rendahnya pendidikan pada gilirannya mengakibatkan terbatasnya lapangan kerja yang dapat dimasuki untuk memperoleh nafkah yang wajar. Demikianlah seterusnya, sehingga penduduk miskin yang hidup dalam serba kekurangan dan keterbelakangan sulit untuk dapat keluar dari lingkaran ketidakberdayaan. Karena itulah maka anggota masyarakat yang lebih beruntung perlu mempunyai kepedulian untuk mengangkat mereka dari kesengsaraan.
3. Setiap kebijakan senantiasa mengandung target dan cara kerja, serta unsur imperatif terhadap seluruh masyarakat. Karena itu dalam analisis kebijakan harus dilakukan berdasarkan prosedur yang logis dan sistematis. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya sekedar mekanisme menterjemahkan tujuan



kebijakan dalam bentuk prosedur rutin dan teknis, melainkan melibatkan faktor sumber daya, hubungan antar organisasi, tingkatan birokrasi, dan golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan.

4. Indikator utama dari kesejahteraan rakyat pada umumnya diukur bukan hanya sekedar dari tingkat penghasilan dan daya beli rakyat, namun mencakup kesejahteraan spiritual dan kultural serta kemampuan untuk terus maju dari masyarakat (Soedijarto, 1995:1).
5. Keterbatasan sumber daya dalam setiap pelaksanaan manajemen senantiasa menuntut upaya-upaya strategik yang lebih efektif dan efisien serta selektif. Tugas agar setiap sumber daya yang tersedia dapat memberikan sumbangan bagi kejayaan organisasi terletak pada kemampuan para manajer untuk mengelolanya secara efektif dan efisien. Para manajer harus memiliki pengetahuan dan penghayatan atas tugas-tugas tersebut (Mughtar Lutfi, 1983:3). Karena itu, efektivitas manajemen pendidikan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan memerlukan disain sistem yang terpadu antara poses, substansi dan konteks masyarakat dimana lembaga pendidikan itu berada.
6. Tugas pendidikan nasional tidak ringan dan merupakan upaya seluruh masyarakat Indonesia. Pasal 47 Undang-undang No. 2 Tahun 1989 mengatakan kemitraan masyarakat dalam ikut serta menyelenggarakan pendidikan nasional. Masalah ciri khas satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan ketentuan undang-undang ini mempunyai implikasi yang luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam membangun SISDIKNAS. Di dalam keikutsertaan itu ada beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian: (1) status kemitraan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berkedudukan sama dalam SISDIKNAS; serta (2) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempunyai ciri khas. Inilah yang dapat disebut jatidiri dari satuan pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh masyarakat (H. A. R. Tilaar, 1999 : 82).

